

**BAB 3**  
**FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL**  
**PENYEBAB INTERVENSI MILITER RUSIA**

*I cannot forecast to you the action of Russia. It is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. But there may be a key, and that key is Russian national interest.*

- Winston Churchill

Bab ini akan membahas faktor-faktor baik internal (domestik) maupun eksternal (internasional) yang menjadi penyebab intervensi militer Rusia terhadap Georgia. Sub-bab pertama akan membahas bagaimana Rusia memandang serta memahami peran dan posisinya di komunitas dunia setelah keruntuhan Uni Soviet, sementara sub-bab kedua adalah analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan Rusia untuk melakukan intervensi militer.

### **3.1 Pandangan Rusia terhadap Kedudukannya di Dunia**

Bagian pertama dari sub-bab ini akan membahas perdebatan mengenai peran dan posisi Rusia di komunitas dunia. Perdebatan ini memainkan peranan penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Rusia paska-Soviet yaitu ketika kebijakan luar negeri Rusia bagaikan pendulum yang mengayun dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya yang mengakibatkan kepentingan, prioritas dan tujuan nasional Rusia yang penuh kontradiksi dan ambiguitas.<sup>200</sup> Bagian kedua akan menguraikan ayunan pendulum kebijakan luar negeri Rusia sejak tahun 1990 hingga pertengahan 2008. Bagian ketiga akan menganalisis klaim Rusia atas status *Great Power* atau *derzhavnost* yang menjadi sebuah ‘ideologi’ baru setelah keruntuhan Uni Soviet dan komunisme. Bagian keempat akan menganalisis kepentingan nasional Rusia yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri Rusia khususnya dalam intervensi militer terhadap Georgia.

---

<sup>200</sup> Richard Sakwa, *Russian Politics and Society* (4<sup>th</sup> ed.), London: Routledge, 2008, h. 365.

### 3.1.1 Eropa, Asia, atau Eurasia?

Posisi geografis Rusia yang unik di antara benua Eropa dan Asia melahirkan perdebatan yang telah berlangsung sejak abad ke-19 mengenai identitas nasional Rusia. Perdebatan ini terjadi antara kelompok ‘*Westernizer*’ (*zapadniki*) yang berpendapat bahwa masa depan Rusia terletak di Eropa dan mendukung penerapan nilai-nilai Eropa di Rusia serta integrasi Rusia ke Barat dan kelompok ‘*Slavophile*’ (*slavyanofily*) yang menyatakan bahwa Rusia adalah bangsa Slav yang secara historis, etnis dan spiritual berbeda dengan Eropa serta menekankan perbedaan antara nilai-nilai Slav yang tradisional, komunal dan Ortodoks dengan nilai-nilai Barat yang modern dan individualis.<sup>201</sup> Dikotomi *Westernizer-Slavophile* hingga kini masih mewarnai perdebatan para elit politik terutama menyangkut peran dan posisi Rusia *vis-à-vis* dunia pada umumnya.<sup>202</sup>

Menurut Bobo Lo dan Vladimir Baranovsky, saat ini perdebatan terbagi ke dalam tiga kelompok pemikiran utama.<sup>203</sup> Kelompok yang pertama menyatakan bahwa Rusia adalah dan selalu merupakan bagian tak terpisahkan dari Eropa. Menurut kelompok ini, Rusia memiliki garis keturunan, sejarah dan budaya yang sama dengan negara-negara Eropa lainnya, dan dalam perjalanan sejarahnya orientasi kebijakan Rusia lebih mengarah ke barat (Eropa) ketimbang timur (Asia). Kelompok ini menggarisbawahi pentingnya integrasi Rusia dengan Eropa, baik demi alasan politis, strategis, maupun ekonomis.<sup>204</sup>

Mengenai kelompok pemikiran yang kedua terdapat sedikit perbedaan antara Baranovsky dan Lo. Walaupun sama-sama mengatakan bahwa kelompok ini lebih melihat Rusia sebagai bagian dari Timur, namun Baranovsky melihat ‘Timur’ sebagai Asia secara keseluruhan sementara Lo melihatnya dari kacamata identitas Slav. Menurut Baranovsky, kelompok ini menyatakan bahwa akar Rusia adalah di Asia, bukan Eropa. Pengaruh Byzantium dan tiga abad di bawah kekuasaan Tatar membuat masyarakat Rusia lebih dekat dengan Asia dan memiliki karakter Asia; selain itu secara etnis Rusia juga merupakan perpaduan

<sup>201</sup> *Ibid.*, h. 355.

<sup>202</sup> Bobo Lo, *Russian Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Reality, Illusions and Mythmaking*, New York: Palgrave Macmillan, 1992, h. 13.

<sup>203</sup> Vladimir Baranovsky, “Russia: A Part of Europe or Apart from Europe?”, *International Affairs* 76: 3 (Jul. 2000), h. 443-444.

<sup>204</sup> Lo, *op. cit.*, h. 16.

dari suku-suku Slav dan Turki. Ekspansi Rusia ke Siberia, Asia Tengah dan Timur Jauh dianggap sebagai manifestasi dari pemikiran ini.<sup>205</sup> Sementara itu menurut Lo kelompok ini menyatakan bahwa Rusia adalah bagian dari peradaban Slav yang meliputi tidak hanya Rusia namun juga Ukraina, Belarus, dan sebagian besar negara-negara Eropa Timur dan Selatan. Kelompok ini memiliki kecurigaan implisit terhadap Eropa bagian Barat termasuk juga terhadap Amerika Serikat.<sup>206</sup> Kelompok ini berpendapat bahwa Rusia tidak perlu bergantung pada Barat untuk memenuhi kepentingannya; Rusia seharusnya lebih mengandalkan nilai-nilai dan karakteristik khas bangsa Slav yang termaktub dalam konsep autokrasi (*samoderzhavie*), konsep ke-Ortodoks-an (*pravoslavie*) dan konsep wawasan kebangsaan (*narodnost*).<sup>207</sup>

Sementara itu kelompok pemikiran yang ketiga menyatakan bahwa Rusia bukan kedua-duanya; Rusia tidak Barat atau Timur, tidak Eropa dan tidak juga Asia. Rusia adalah sebuah peradaban yang khas, sebuah dunia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki aturan main yang berbeda dengan Eropa maupun Asia.<sup>208</sup> Apabila kelompok yang pertama dan kedua membangkitkan kembali dikotomi *Westernizer-Slavophile* maka kelompok yang ketiga merupakan merupakan sintesis terhadap dikotomi tersebut dengan mengajukan sebuah pemikiran yang disebut 'Eurasianisme'.<sup>209</sup> Istilah Eurasia sendiri merupakan gabungan dari Eropa dan Asia; istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1921 dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh empat sarjana Rusia yang berada dalam pengasingan setelah melarikan diri dari perang saudara yang menyelimuti Rusia paska-Revolusi Bolshevik. Buku ini berisi artikel-artikel yang ditulis keempat sarjana tersebut yang menguraikan dasar-dasar Eurasianisme sebagai pemikiran alternatif bagi Rusia.<sup>210</sup> Salah satu dasar pemikiran Eurasianisme adalah bahwa Rusia berfungsi sebagai 'jembatan' yang

<sup>205</sup> Baranovsky, *op. cit.*, h. 444.

<sup>206</sup> Lo, *op. cit.*, h. 15.

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> Baranovsky, *loc. cit.*

<sup>209</sup> Lacha Tchantouridze, *Awakening of Spirits: Eurasianism and Geopolitics in the Foreign Policy of Russia*, disertasi untuk gelar Ph.D. di Queen's University, Ontario, Kanada, September 2001, h. 136.

<sup>210</sup> *Ibid.*, h. 140.

menghubungkan Barat dan Timur.<sup>211</sup> Eurasianisme praktis diabaikan sepanjang perjalanan Uni Soviet sebelum mengalami kebangkitan pada dekade 90-an ketika ide-ide Eurasianisme diajukan sebagai argumen logis untuk membentuk sebuah negara Rusia yang kuat dan bersatu.<sup>212</sup> Eurasianisme kemudian menjadi salah satu landasan bagi kebijakan-kebijakan Rusia terhadap negara-negara bekas Uni Soviet yang tergabung dalam Persemakmuran Negara-negara Independen (*Commonwealth of Independent States* atau CIS).

### 3.1.2 Ayunan Pendulum Kebijakan Luar Negeri Rusia

Dalam bukunya yang berjudul *Russian Politics and Society* Richard Sakwa membagi dinamika kebijakan luar negeri Rusia ke dalam enam tahap<sup>213</sup>: tahap kemunculan, tahap pembentukan, tahap ‘romantis’, tahap reorientasi, tahap pragmatisme kompetitif, dan tahap realisme baru. Tahap yang pertama terjadi saat Rusia masih menjadi bagian dari Uni Soviet; parlemen Republik Soviet Rusia mendeklarasikan kedaulatan Rusia pada bulan Juni 1990 dan pada bulan Oktober membentuk Kementerian Luar Negeri (*Ministerstvo inostrannykh del* atau MID) yang terpisah dari MID Uni Soviet.<sup>214</sup> Jabatan menteri luar negeri diberikan kepada Andrei Kozyrev, seorang diplomat karir yang sebelumnya bekerja di Direktorat Organisasi Internasional MID Uni Soviet selama 16 tahun. Pengalamannya yang panjang dalam bidang tersebut membuat Kozyrev sangat memandang tinggi peran lembaga-lembaga internasional dan mendukung partisipasi Rusia di dalamnya.

Tahap kedua adalah periode antara Agustus dan Desember 1991, yaitu setelah percobaan kudeta terhadap Gorbachev dan sebelum pembubaran Uni Soviet. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya peristiwa kudeta ini mempercepat keruntuhan Uni Soviet sehingga pada tahap ini MID Rusia mengonsolidasikan dirinya sebagai satu-satunya lembaga perumusan kebijakan luar negeri di Rusia setelah Yeltsin menghapus MID Uni Soviet pada bulan Desember.<sup>215</sup> Selama periode Januari 1992 hingga Februari 1993 kebijakan luar

<sup>211</sup> Lo, *op. cit.*, h. 19.

<sup>212</sup> Tchantouridze, *op. cit.*, h. 166.

<sup>213</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 365.

<sup>214</sup> *Ibid.*, h. 366.

<sup>215</sup> *Ibid.*, h. 368.

negeri Rusia memasuki tahap ketiga yaitu tahap yang disebut ‘romantis’ karena upaya Rusia untuk mendekat ke negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat) lebih didorong oleh harapan dan keinginan yang idealis ketimbang rasionalitas atau realita.<sup>216</sup> Yeltsin menginginkan hubungan yang lebih harmonis dengan Barat antara lain untuk memperoleh bantuan pinjaman dari negara-negara Barat dan menjamin lingkungan internasional yang lebih kondusif demi melancarkan reformasi politik dan ekonomi yang sedang dilakukan Rusia. Kozyrev adalah orang yang sangat tepat untuk merealisasikan hal tersebut karena pengalaman kerjanya dan keinginannya untuk mengembangkan kebijakan luar negeri yang berdasarkan nilai-nilai liberal seperti demokrasi dan HAM, sebuah keinginan yang disambut dengan baik oleh Barat.<sup>217</sup>

Dalam praktiknya kebijakan luar negeri pada tahap ini mengarah ke posisi yang sangat pro-Barat yang ditunjukkan dengan tindakan-tindakan seperti liberalisasi ekonomi dan keanggotaan dalam lembaga-lembaga internasional (Rusia bergabung dengan IMF dan Bank Dunia pada bulan April 1992). Namun demikian arah kebijakan ini mengundang kritik dari berbagai kalangan. Kozyrev dituding sebagai seorang *zapadnik* yang terlalu menuruti apapun yang dilakukan atau disuruh Barat sehingga mengorbankan kepentingan nasional dan keamanan Rusia serta mengabaikan hubungan Rusia dengan negara-negara di *near abroad*.<sup>218</sup> Sementara itu Yeltsin juga menerima kritik atas kinerja perekonomian Rusia yang memburuk akibat penerapan kebijakan ekonomi neo-liberal (yang didukung oleh Barat).<sup>219</sup> Bantuan yang diminta dari Barat ternyata tidak sesuai yang diharapkan sementara Rusia telah banyak memberikan konsesi ekonomi dan politik kepada Barat; akibatnya ‘romantisme’ kebijakan luar negeri pada tahap ini dianggap telah mempermalukan bangsa dan menjatuhkan prestise Rusia di mata dunia.<sup>220</sup>

---

<sup>216</sup> *Ibid.*, h. 369.

<sup>217</sup> Robert H. Donaldson & Joseph L. Noguee, *The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests*, New York: M. E. Sharpe, 1998, h. 113.

<sup>218</sup> Alexei K. Pushkov, “Letter from Eurasia: Russia and America: The Honeymoon’s Over”, *Foreign Policy* No. 93 (Winter 1993-1994), h. 78-79.

<sup>219</sup> Alexei G. Arbatov, “Russia’s Foreign Policy Alternatives”, *International Security* 18:2 (Autumn 1993), h. 17-18.

<sup>220</sup> *Ibid.*, h. 23.

Kombinasi antara kritik internal dan perkembangan eksternal menyebabkan berakhirnya tahap 'romantis' dan dimulainya tahap reorientasi kebijakan luar negeri Rusia. Tahap ini ditandai dengan konsolidasi kelompok oposisi yang menginginkan kebijakan luar negeri yang lebih independen dan asertif. Peristiwa penting dalam tahap ini adalah diterbitkannya Konsep Kebijakan Luar Negeri pada bulan April 1993 yang menegaskan bahwa Rusia memiliki kepentingan yang tidak akan selalu selaras dengan Barat dan menggarisbawahi peran penting Rusia sebagai penjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan *near abroad*.<sup>221</sup>

Konsep ini mengisyaratkan awal dari kebijakan luar negeri yang bernuansa Eurasianis dan didukung oleh sebagian besar anggota parlemen. Untuk menepis kritik yang semakin kencang ditujukan kepadanya, Kozyrev memodifikasi retorika dan kebijakannya sehingga lebih mendekati posisi para Eurasianis. Sayangnya usaha ini malah semakin merusak reputasi dan kredibilitasnya sebagai seorang liberal maupun sebagai pejabat negara baik di dalam negeri dan di luar negeri: di dalam negeri para pengkritiknya mengecam Kozyrev sebagai seorang oportunis politik sementara di luar negeri hubungan Rusia-AS mengalami masalah yang serius akibat perang yang terjadi di Bosnia (1992-1995) dan sikap Kozyrev yang ambivalen dalam menangani konflik tersebut.<sup>222</sup> Sebagai akibatnya Kozyrev semakin menjadi bulan-bulanan para pengkritiknya dan Yeltsin mendapat tekanan keras untuk memecat menteri tersebut. Kozyrev akhirnya mengundurkan diri pada bulan Januari 1996 setelah memutuskan untuk mempertahankan kursinya di parlemen; posisinya digantikan oleh Yevgeny Primakov yang sebelumnya menjabat kepala Badan Intelijen Asing (*Foreign Intelligence Service*).

Pengunduran diri Kozyrev menandai akhir dari tahap reorientasi dan awal dari tahap pragmatisme kompetitif yang berlangsung hingga akhir pemerintahan Yeltsin pada tahun 1999. Primakov memiliki pandangan yang kritis terhadap Barat sehingga dalam konferensi persnya yang pertama setelah menjabat menteri luar negeri ia menyatakan bahwa hubungan Rusia dengan Barat harus merupakan "sebuah kerja sama yang berimbang dan saling menguntungkan dengan

---

<sup>221</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 370.

<sup>222</sup> *Ibid.*

memperhatikan kepentingan masing-masing”.<sup>223</sup> Primakov lalu menyebutkan empat tugas yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya, yaitu 1) menciptakan kondisi eksternal yang kondusif untuk memperkuat keutuhan teritorial negara; 2) mendukung upaya-upaya integrasi (ekonomi) diantara negara-negara CIS; 3) menciptakan stabilisasi situasi internasional melalui penyelesaian konflik-konflik regional terutama di kawasan *near abroad*; dan 4) membangun hubungan internasional yang positif untuk mencegah terciptanya konflik-konflik baru dan proliferasi senjata pemusnah masal.<sup>224</sup>

Di bawah Primakov kebijakan luar negeri Rusia menuju posisi yang lebih asertif dan independen *vis-à-vis* Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.<sup>225</sup> Pragmatisme yang diusung Primakov ini berakar pada pemahaman realisme yang sangat tradisional dan pandangan anti-Barat yang dibingkai dalam kerangka ‘multipolaritas’. Pragmatisme ini mengacu pada pendekatan realisme klasik tentang kompetisi dan perimbangan kekuatan karena pada dasarnya Primakov berniat menggunakan multipolaritas untuk membangun Rusia sebagai kutub alternatif yang menjadi penyeimbang bagi Barat.<sup>226</sup> Pragmatisme ini bertahan hingga akhir pemerintahan Yeltsin pada bulan Desember 1999; pada saat itu Primakov sudah tidak menjabat lagi sebagai menteri luar negeri dan naiknya Vladimir Putin sebagai presiden baru Rusia membawa perubahan pada arah kebijakan luar negeri Rusia.

Pada masa pemerintahan Putin kebijakan luar negeri Rusia berpijak pada apa yang disebut Sakwa sebagai ‘realisme baru’, yakni pandangan Putin mengenai peran dan posisi Rusia di dunia yang lebih berlandaskan penilaian obyektif terhadap kapabilitas dan kapasitas negara ketimbang ambisi dan retorika. Putin memformulasikan kebijakan luar negeri yang menekankan kepentingan nasional Rusia namun tanpa mengurangi usaha Rusia untuk berintegrasi dengan komunitas dunia.<sup>227</sup> Sakwa mengidentifikasi tujuh karakteristik dari realisme baru, yaitu 1) kepentingan ekonomi sebagai dasar kebijakan luar negeri; 2) Eropa-sentrisme; 3)

<sup>223</sup> Dikutip dalam Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 119; terjemahan oleh penulis.

<sup>224</sup> *Ibid.*, h. 119-120.

<sup>225</sup> Allen C. Lynch, “The Realism of Russia’s Foreign Policy”, *Europe-Asia Studies* 53:1 (Jan. 2001), h. 22.

<sup>226</sup> Richard Sakwa, *Putin: Russia’s Choice* (2<sup>nd</sup> ed.), London: Routledge, 2008, h. 270 & 277.

<sup>227</sup> Richard Sakwa, “‘New Cold War’ or twenty years’ crisis? Russia and international politics”, *International Affairs* 84:2 (2008), h. 242.

sekuritisasi ancaman-ancaman non-tradisional; 4) otonomi vs. kompetisi; 5) bilateralisme vs. multilateralisme; 6) kontrol terhadap klaim atas status *Great Power*; dan 7) ‘normalisasi’ hubungan antara Rusia dengan Barat dan dunia.<sup>228</sup> Melalui realisme baru, Putin mencari jalan tengah antara romantisme yang merendahkan pada era Kozyrev dan pragmatisme yang melebih-lebihkan pada era Primakov.<sup>229</sup>

Pada periode pertama Putin (2000-2004) jalan tengah ini diwujudkan antara lain dalam sikap Rusia terhadap ‘perang melawan teror’ yang dilancarkan Amerika Serikat setelah peristiwa 11 September 2001. Segera setelah peristiwa tersebut Putin langsung menelpon presiden AS George W. Bush untuk menyampaikan rasa simpati dan bela sungkawa. Putin lalu menyatakan dukungan dan kerja sama secara penuh dengan Amerika Serikat dalam perjuangan melawan terorisme internasional. Namun demikian di sisi lain Putin juga tidak ingin memosisikan Rusia sebagai bawahan Amerika melalui penentangan dan penolakannya terhadap koalisi yang dibentuk AS untuk menyerang Irak pada bulan Maret 2003.<sup>230</sup>

Pada tahap ini pendulum sepertinya telah berada pada titik equilibrium namun lagi-lagi perkembangan internal dan eksternal mengakibatkan pendulum kembali mengayun. Pada periode Putin yang kedua (2004-2008), pandangan realisme baru perlahan-lahan ditinggalkan dan Rusia kembali ke tahap pragmatisme kompetitif. Dari segi domestik, Rusia mengalami kebangkitan ekonomi dan stabilitas politik yang menciptakan perasaan kemandirian dan kepercayaan diri di tingkat internasional.<sup>231</sup> Dari segi eksternal, Rusia merasa bahwa jalan tengah yang dicanangkan Putin tidak mampu membuat Barat menganggap Rusia sebagai aktor yang sejajar di forum internasional maupun menghentikan kritik-kritik yang selalu dilancarkan Barat terhadap apa yang oleh Rusia dianggap sebagai urusan dalam negerinya.<sup>232</sup>

<sup>228</sup> Sakwa, *Putin*, h. 275-278.

<sup>229</sup> *Ibid.*, h. 279.

<sup>230</sup> *Ibid.*, h. 280.

<sup>231</sup> Dmitry Trenin, “Russia’s Strategic Choices”, *Carnegie Endowment for International Peace Policy Brief #50*, Mei 2007, h. 1.

<sup>232</sup> Sakwa, ‘New Cold War’, h. 249; contoh dari kritik yang dimaksud adalah mengenai ‘nasib’ demokrasi di Rusia setelah kejadian-kejadian yang dianggap sebagai kemunduran bagi



Pergeseran ke pragmatisme kompetitif berlanjut hingga pemerintahan Dmitry Medvedev saat ini yang antara lain ditunjukkan dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri tahun 2008. Dokumen ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang visi dan misi sang presiden baru, namun ternyata isinya masih merupakan kelanjutan dari pandangan dan pemikiran Vladimir Putin (yang kini menjabat perdana menteri).<sup>233</sup> Kebijakan luar negeri Rusia saat ini berpedoman pada apa yang disebut sebagai *sovereign democracy* atau ‘demokrasi yang berdaulat’, yaitu sebuah konsep yang menekankan kedaulatan dan kemandirian Rusia dari Barat dan menyatakan bahwa Rusia memiliki demokrasi yang setara namun berbeda dengan demokrasi sebagaimana yang didefinisikan dan diterapkan di Barat.<sup>234</sup> Dalam sebuah wawancara televisi pada tanggal 31 Agustus 2008 Medvedev menguraikan lima prinsip kebijakan luar negeri Rusia ke depan sebagai berikut<sup>235</sup>:

- 1) Rusia mengakui supremasi prinsip-prinsip dasar dari hukum internasional yang menentukan hubungan antara masyarakat beradab. Rusia akan membangun hubungan dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip dan konsep dari hukum internasional ini.
- 2) Dunia harus bersifat multipolar, bukan unipolar. Rusia tidak dapat menerima sebuah tatanan dunia dimana seluruh keputusan diambil oleh hanya satu negara, bahkan sebuah negara yang begitu berpengaruh seperti Amerika Serikat. Dunia semacam ini terancam oleh konflik dan tidaklah stabil.
- 3) Rusia tidak menginginkan konfrontasi dengan negara lain. Rusia tidak berniat mengisolasi dirinya sendiri dan sebanyak mungkin akan membangun hubungan yang bersahabat dengan Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya.

---

demokratisasi di Rusia seperti kasus Yukos, krisis penyanderaan di Beslan, intervensi Rusia dalam pemilihan umum di Ukraina, dan pembunuhan terhadap jurnalis Anna Politkovskaya.

<sup>233</sup> Dmitry Trenin, “Waiting for a Democratic Godot in the Kremlin”, *The Moscow Times*, 21 Juli 2008. <<http://www.themoscowtimes.com/article/1016/42/369069.htm>> (diakses 20 April 2009).

<sup>234</sup> Dmitry Trenin, “Russia’s Coercive Diplomacy”, *Carnegie Moscow Center Briefing Vol. 10 Issue 1*, Januari 2008, h. 2.

<sup>235</sup> Wawancara Presiden Rusia Dmitry Medvedev dengan stasiun televisi *Channel One, Rossia*, dan NTV di kota Sochi pada tanggal 31 Agustus 2008.

<[http://kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/08/31/1850\\_type82912type82916\\_206003.shtml](http://kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/08/31/1850_type82912type82916_206003.shtml)> (diakses 15 September 2008).

- 4) Prioritas mutlak dari Rusia adalah melindungi nyawa dan kehormatan warga negaranya dimana pun mereka berada serta melindungi kepentingan komunitas bisnisnya di luar negeri. Rusia akan merespon setiap tindakan agresif yang ditujukan kepadanya.
- 5) Rusia memiliki kepentingan eksklusif di kawasan tertentu. Kawasan ini terdiri dari negara-negara yang memiliki hubungan historis khusus dengan Rusia serta terikat sebagai sahabat dan tetangga baik bagi Rusia. Rusia akan memberi perhatian penuh pada hubungan yang baik dan bersahabat dengan negara-negara yang menjadi tetangga terdekat Rusia ini.

### 3.1.3 Rusia dan Status Kekuatan Besar (*Derzhavnost*)

Pada tahun 1947 George F. Kennan, seorang diplomat AS yang menjabat duta besar untuk Uni Soviet selama periode 1944-1946, telah memprediksikan keruntuhan Uni Soviet dengan mengatakan: “*Soviet power, like the capitalist world of its conception, bears within it the seeds of its own decay, and that the sprouting of these seeds is well advanced.*” Kennan lalu memperingatkan: “...[if] anything were ever to occur to disrupt the unity and efficacy of the Party as a political instrument, Soviet Russia might be changed overnight from one of the strongest to one of the weakest and most pitiable of national societies.”<sup>236</sup> Empat puluh lima tahun kemudian prediksi diplomat yang menjadi salah satu penggagas doktrin *containment* AS terhadap komunisme ini menjadi kenyataan: keruntuhan Uni Soviet lebih diakibatkan oleh faktor-faktor internal ketimbang eksternal.<sup>237</sup>

Setelah lepas dari Uni Soviet Rusia berada dalam suasana yang penuh ketidakpastian. Richard Sakwa mengatakan: “*the rebirth of Russian statehood was accompanied by the tension between internal state-building and external withdrawal, imbuing the whole process with a sense of defeat and failure.*”<sup>238</sup> Rusia kehilangan statusnya sebagai *superpower* dan merasakan prestisenya jatuh di mata dunia. Namun demikian pengakuan internasional terhadap status Rusia sebagai pewaris Uni Soviet menjadi ‘obat’ bagi Rusia. Pengakuan ini antara lain

<sup>236</sup> George F. Kennan, “The Sources of Soviet Conduct”, *Foreign Affairs*, 1947. <<http://www.historyguide.org/Europe/kennan.html>> (diakses 27 April 2009).

<sup>237</sup> Sakwa, *Russian Politics*, h. 28.

<sup>238</sup> *Ibid.*, h. 39.

ditandai dengan pengalihan tanggung jawab Uni Soviet (seperti kepemilikan dan pengawasan terhadap senjata nuklir serta perjanjian-perjanjian internasional) kepada Rusia dan pengambilalihan kedudukan Uni Soviet sebagai anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB. Kursi di DK PBB ini yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi Rusia untuk mengklaim apa yang disebut sebagai *derzhavnost* atau ‘status kekuatan besar’ (*great power status*).<sup>239</sup>

*Derzhavnost* adalah sebuah perasaan yang berdasarkan keyakinan atas status global Rusia dan asumsi bahwa Rusia harus berpikir dan bertindak sebagai sebuah kekuatan dunia yang mempunyai peranan penting dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat internasional.<sup>240</sup> Konsekuensi dari perasaan ini adalah keinginan Rusia untuk diperlakukan oleh negara-negara lain sesuai dengan statusnya tersebut.<sup>241</sup> Iver Neumann menjelaskan kaitan itu sebagai berikut:

*“In order to be great you need the recognition of others, and in order to be recognized you need to be noticed and thought of on a regular basis. To be a great power is, among other things, to be present when absent - that is, to be taken into consideration by other powers as a matter of course and in issues that the power in question itself may not even know are being discussed.”*<sup>242</sup>

Klaim ini telah diungkapkan bahkan sebelum Uni Soviet berakhir dan kini *derzhavnost* telah dianggap sebagai sebuah ‘ideologi’ yang selalu didengungkan oleh para pembuat keputusan di Rusia.<sup>243</sup> Pada bulan Oktober 1990 Yeltsin mengatakan bahwa Rusia adalah sebuah “kekuatan besar” yang mencari “tempat yang patut dalam komunitas masyarakat yang beradab di Eurasia dan Amerika”.<sup>244</sup> Kozyrev mengatakan dalam jurnal *Foreign Affairs* bahwa Rusia “tidak akan pernah berhenti menjadi sebuah kekuatan besar” dan akan “menempatkan kepentingan nasionalnya sebagai prioritas”.<sup>245</sup> Dan dalam sebuah

<sup>239</sup> *Ibid.*, h. 368.

<sup>240</sup> Lo, *op. cit.*, h. 53.

<sup>241</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>242</sup> Iver B. Neumann, “Russia as a great power”, dalam Jakob Hedenskog *et al.* (eds.), *Russia as a Great Power: Dimensions of Security under Putin*, London: Routledge, 2005, h. 15.

<sup>243</sup> Lo, *op. cit.*

<sup>244</sup> Dikutip dalam Sakwa, *op. cit.*, h. 366; terjemahan oleh penulis.

<sup>245</sup> Andrei Kozyrev, “Russia: A Chance for Survival”, *Foreign Affairs* 71:2 (Spring, 1994), h. 10; terjemahan oleh penulis.

artikel berjudul “*Russia at the Turn of the Millenium*” yang diterbitkan menjelang akhir abad ke-20, Putin mengatakan:

*“Russia was and will remain a great power. It is preconditioned by the inseparable characteristics of its geopolitical, economic and cultural existence. They determined the mentality of Russians and the policy of the government throughout the history of Russia and they cannot but do so now.”*<sup>246</sup>

Bagian berikutnya akan menunjukkan bagaimana *derzhavnost* dijadikan tujuan bangsa yang termaktub dalam dokumen resmi tentang kepentingan nasional Rusia serta bagaimana hubungan Rusia dengan *near abroad* menjadi prioritas bagi kebijakan luar negeri Rusia.

#### 3.1.4 Kepentingan Nasional Rusia

Kutipan yang ditulis di awal bab ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi Winston Churchill dalam memahami Uni Soviet. Kesulitan ini masih relevan hingga saat ini meskipun Uni Soviet telah tidak lagi eksis dan digantikan oleh Rusia, namun seperti yang dikatakan Churchill, ‘kunci’ dari Rusia mungkin terletak pada kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, jawaban dari segala pertanyaan tentang Rusia bisa diperoleh dari analisis terhadap kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional Rusia termaktub dalam Konsep Keamanan Nasional yang dirumuskan oleh Dewan Keamanan Federasi Rusia. Revisi terakhir dokumen ini diterbitkan pada tahun 2000 dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang kepentingan-kepentingan nasional Rusia, yaitu:

*“...a combination of balanced interests of the individual, society and the state in the economic, domestic political, social, international, information, military, border, ecological, and other spheres. They are long-term and determine the basic goals, strategic and current tasks of the domestic and foreign policy of the country.”*<sup>247</sup>

<sup>246</sup> Dikutip dalam Sakwa, *Putin*, h. 323.

<sup>247</sup> Lihat Bab II dari *The National Security Concept of the Russian Federation* (2000) tentang Kepentingan-kepentingan Nasional Rusia.

Kepentingan nasional Rusia yang menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri berada pada lingkup internasional. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh James Rosenau di bab 1, kepentingan nasional bisa digunakan sebagai justifikasi atas tindakan negara. Kepentingan nasional Rusia pada lingkup internasional adalah:

*“...ensuring the sovereignty and reinforcing the position of Russia as a **great power** and one of the influential centres of the multipolar world, developing equitable and mutually beneficial relations with all countries and integration associations, **above all the countries members of the Commonwealth of Independent States** and Russia's traditional partners, all-round respect for human rights and freedoms and inadmissibility of double standards in this sphere.”<sup>248</sup>*

Dari satu alinea ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) *Derzhavnost* adalah kepentingan nasional Rusia yang harus diperjuangkan oleh segenap komponen bangsa; dan
- 2) Rusia menempatkan hubungan dengan negara-negara *near abroad* sebagai prioritas kebijakan luar negeri.

Salah satu perubahan yang terjadi akibat ayunan pendulum kebijakan luar negeri Rusia adalah perihal hubungan Rusia dengan anggota-anggota CIS lainnya. Hubungan ini relatif diabaikan pada awal periode Yeltsin namun menjadi semakin penting pada pertengahan tahun 90-an ketika para Eurasianis seperti Andranik Migranyan menyatakan bahwa Rusia memiliki peran dan posisi sebagai penjamin keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan.<sup>249</sup> Alexei Pushkov mengatakan bahwa peran dan posisi ini adalah “harga yang harus dibayar oleh Barat atas disintegrasi Uni Soviet.”<sup>250</sup> Peran dan posisi Rusia ini ditegaskan dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia tahun 2008 yang menempatkan hubungan Rusia dengan *near abroad* sebagai prioritas dari kebijakan luar negeri Rusia.<sup>251</sup> Prioritas ini merupakan implementasi dari *derzhavnost* dan pemikiran Eurasianisme

<sup>248</sup> *Ibid.*; cetak tebal oleh penulis.

<sup>249</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 114.

<sup>250</sup> Pushkov, *op. cit.*, h. 89.

<sup>251</sup> Lihat Bab IV dari *The Foreign Policy Concept of the Russian Federation* (2008) mengenai Prioritas-prioritas Regional.

dimana kawasan *near abroad* dipandang sebagai lingkaran pengaruh (*sphere of influence*) yang natural bagi Rusia dilihat dari segi keamanan, ekonomi, moral, politik, dan kebudayaan.<sup>252</sup>

Dari segi ekonomi, sebagian besar negara-negara CIS masih memiliki ketergantungan terhadap Rusia sebagai penyedia minyak, gas bumi dan peralatan industri berat. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila Rusia menjadi mitra dagang utama sekaligus “nukleus ekonomi” bagi perkembangan CIS.<sup>253</sup> Dari segi moral dan politik, Rusia merasa bertanggung jawab atas sekitar 25 juta etnis Rusia yang sekarang berdomilisi di *near abroad* dan masih dianggap sebagai warga Rusia; konsekuensinya, Rusia merasa memiliki hak dan kewajiban untuk memperjuangkan nasib warganya tersebut bahkan apabila perlu melalui intervensi langsung. Dari segi kebudayaan, Rusia menganggap dirinya sebagai pusat dari peradaban Eurasia sehingga mengemban sebuah misi yang diartikulasikan oleh mantan penasehat presiden Sergei Stankevich sebagai berikut:

*“...to initiate and maintain a multilateral dialogue of cultures, civilizations and states. Russia the conciliator, Russia the unifier, Russia the harmonizer. A country that takes in West and East, North and South, and thus is uniquely capable of harmoniously unifying many different elements, of achieving a historic symphony.”*<sup>254</sup>

Namun demikian, menurut pendapat penulis hubungan antara Rusia dengan negara-negara *near abroad* lebih ditentukan oleh pertimbangan keamanan karena pada akhirnya pertimbangan keamanan mencakup semua pertimbangan-pertimbangan yang lain. Rusia melihat wilayah bekas Uni Soviet sebagai salah satu sumber ancaman terhadap keamanan Rusia; sebagaimana dengan yang termaktub dalam Konsep Keamanan Nasional 2000, ancaman utama dalam lingkup internasional ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut<sup>255</sup>:

- 1) Keinginan dari negara-negara individual atau asosiasi antarnegara untuk merendahkan peran dari mekanisme-mekanisme penjaga keamanan

<sup>252</sup> Lo, *op. cit.*, h. 50.

<sup>253</sup> Pushkov, *loc. cit.*

<sup>254</sup> Dikutip dalam Donaldson & Noguee, *loc. cit.*

<sup>255</sup> Lihat Bab III dari *The National Security Concept of the Russian Federation* (2000) tentang Ancaman-ancaman terhadap Keamanan Nasional Rusia; terjemahan oleh penulis.

internasional terutama PBB dan OSCE (*Organization for Security and Cooperation in Europe*);

- 2) Bahaya yang ditimbulkan dari melemahnya pengaruh politik, ekonomi dan militer Rusia di dunia;
- 3) Penguatan blok dan uni militer-politik, terutama perluasan NATO ke timur;
- 4) Kemungkinan hadirnya pangkalan militer asing atau kontingen militer dalam jumlah besar dalam posisi yang berdekatan dengan perbatasan Federasi Rusia;
- 5) Proliferasi senjata pemusnah masal dan wahana penyampaiannya (*delivery vehicles*);
- 6) Melemahnya proses-proses integrasi di CIS;
- 7) Kehadiran dan eskalasi konflik di atau dekat dengan perbatasan Federasi Rusia dan perbatasan eksternal CIS; dan
- 8) Klaim terhadap wilayah teritorial Federasi Rusia.

Margot Light mengatakan bahwa persepsi Rusia atas ancaman keamanan yang muncul dari *near abroad* ditentukan oleh enam faktor, yaitu<sup>256</sup>:

- 1) Konflik-konflik yang berada di sekitar Rusia dapat meluas (*spill over*) hingga melibatkan Rusia;
- 2) Gerakan-gerakan separatis di *near abroad* ditakutkan dapat mengakibatkan gangguan terhadap integritas Rusia;
- 3) Etnis Rusia yang menjadi minoritas di negara-negara bekas Uni Soviet berada dalam resiko yang tinggi;
- 4) Kekuatan-kekuatan eksternal dapat melakukan intervensi terhadap konflik-konflik di sekitar Rusia sehingga mengancam kepentingan Rusia secara langsung maupun tidak langsung;
- 5) Kekhawatiran akan terbentuknya aliansi regional yang mengikutsertakan sebagian negara-negara bekas Uni Soviet tanpa Rusia sehingga mengisolasi Rusia; dan

<sup>256</sup> Margot Light, "Russia and Transcaucasia", dalam John F. R. Wright *et al.* (eds.), *Transcaucasian Boundaries*, London: UCL Press, 1996, h. 47.

- 6) Perekonomian Rusia dapat dipengaruhi oleh penolakan sebagian negara-negara CIS untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dari kerja sama perdagangan dengan Rusia.

Light menyebutkan faktor-faktor ini sesuai dengan situasi domestik dan eksternal Rusia pada tahun 1996, namun hingga kini faktor-faktor tersebut masih relevan; jelasnya, ketakutan Rusia akan efek *spill over* dari konflik-konflik yang terjadi di sekitar perbatasan Rusia terjustifikasi oleh krisis di Ossetia Selatan yang akhirnya meluas menjadi konflik antara Rusia dengan Georgia.

### **3.2 Faktor-faktor Penyebab Intervensi Militer Rusia terhadap Georgia**

Sub-bab ini akan melihat faktor-faktor spesifik yang menurut penulis menjadi latar belakang dari keputusan Rusia untuk melakukan intervensi militer terhadap Georgia. Faktor-faktor ini adalah kondisi ekonomi, kekuatan dan kemampuan militer Rusia, perluasan NATO ke timur, dan prestise. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi dimana Rusia memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer sebagai respon terhadap krisis yang terjadi di Ossetia Selatan.

#### **3.2.1 Kondisi Ekonomi**

Rusia telah menghadapi sebuah krisis domestik bahkan sebelum Uni Soviet menjadi bagian dari sejarah. Reformasi yang dilakukan Gorbachev melalui *perestroika* telah memporak-porandakan sistem ekonomi Rusia yang selama 70 tahun dikontrol secara ketat oleh negara. Rusia mewarisi 61 persen dari GNP Uni Soviet namun juga dibebani oleh defisit anggaran yang membengkak, devaluasi rubel (mata uang Rusia), dan kontrol harga yang ketat. Hasilnya adalah produktivitas pekerja yang rendah dan inflasi yang tak terkendali.<sup>257</sup> Sadar akan kondisi tersebut, Yeltsin menjadikan pemulihan ekonomi sebagai prioritasnya yang paling mendesak. Yeltsin memutuskan untuk mempercepat proses perubahan menuju sistem ekonomi pasar dan kemudian menyusun sebuah tim ekonomi yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang liberal dan pro-ekonomi pasar seperti Anatoly Chubais, Gennady Burbulis dan Yegor Gaidar. Gaidar diangkat

---

<sup>257</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 288.



sebagai deputi perdana menteri dan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Tim ini kemudian memutuskan untuk menerapkan program liberalisasi ekonomi yang disebut ‘terapi kejut’ (*shock therapy*). Program ini sebelumnya berhasil diterapkan di Polandia dan dipromosikan sebagai metode terbaik untuk melakukan transisi dari sosialisme ke kapitalisme oleh ekonom-ekonom Barat dan lembaga internasional seperti IMF.<sup>258</sup> Ide pokok dari terapi kejut adalah memaksa sistem ekonomi yang sentralistik untuk berubah menjadi sistem ekonomi pasar melalui proses transisi yang cepat dan pembatasan terhadap peran negara. Langkah-langkah spesifik yang harus dilakukan dalam terapi kejut adalah liberalisasi harga, stabilisasi ekonomi makro (melalui pengurangan belanja negara dan pembatasan terhadap pertumbuhan uang dan kredit), privatisasi badan usaha milik negara (BUMN), penghapusan total perencanaan ekonomi sentral, dan pencabutan tarif serta peraturan lainnya yang menghalangi perdagangan bebas dan investasi asing.<sup>259</sup> Terapi kejut mulai berlaku secara efektif pada tanggal 2 Januari 1992 ketika pemerintah menghapus kontrol administratif terhadap harga barang yang kemudian dilanjutkan dengan pencabutan pembatasan terhadap perdagangan pada tanggal 29 Januari.<sup>260</sup>

Kritik-kritik tersebut menjadi bertambah keras ketika terapi kejut tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Terapi kejut memang memiliki efek negatif yaitu munculnya periode dimana harga barang akan meroket dan produksi akan mengalami penurunan, namun harapannya setelah melalui masa sulit ini harga-harga akan menjadi stabil dan upaya pemerintah untuk membangun pasar akan memulihkan proses produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>261</sup> Dalam kasus Rusia, masa sulit yang telah diantisipasi ini ternyata tidak segera berakhir dan menyebabkan perekonomian semakin buruk.

---

<sup>258</sup> David M. Kotz & Fred Weir, *Russia's Path from Gorbachev to Putin: The Demise of the Soviet System and the New Russia*, London: Routledge, 2007, h. 160.

<sup>259</sup> *Ibid.*, h. 156.

<sup>260</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 292.

<sup>261</sup> *Ibid.*, h. 291.

**Tabel 3.1 Kinerja Perekonomian Rusia 1990-1999**

Tahun	Perubahan GDP dibandingkan tahun sebelumnya (dalam %)	Produksi industri (dalam %)	Inflasi (dalam %)
1990	- 3,0	- 0,1	78
1991	- 5,0	- 8,0	138
1992	- 14,5	- 18,0	2.323
1993	- 8,7	- 14,1	844
1994	- 12,7	- 20,9	202
1995	- 4,1	- 3,3	131
1996	- 3,6	- 4,0	21,8
1997	1,4	1,9	11
1998	- 5,3	- 5,5	84,4
1999	6,4	8,1	36,5

Sumber: Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*, h. 299

Tabel 3.1 menunjukkan kinerja perekonomian Rusia dari tahun 1990 hingga tahun 1999, yaitu dari sejak deklarasi kedaulatan Rusia hingga akhir pemerintahan Yeltsin. GDP Rusia menurun hingga 42 persen dan produksi industri hingga 46 persen.<sup>262</sup> Setelah kontrol harga dihapus pada bulan Januari, harga barang di pasar melonjak hingga 2.500 persen sepanjang tahun 1992. Dampak nyata dari semua ini adalah standar hidup masyarakat yang semakin menurun. Barang-barang menjadi langka dan walaupun ada harganya menjadi berlipat ganda; sebagai contoh, harga satu kilo daging naik dari 2 rubel pada bulan Januari 1991 menjadi 3.187 rubel pada bulan Juni 1994!<sup>263</sup> Kenaikan harga barang tidak diikuti oleh penyesuaian standar gaji sehingga tidak sedikit rumah tangga

<sup>262</sup> Kotz & Weir, *op. cit.*, h. 168.

<sup>263</sup> *Ibid.*, h. 173.

yang ‘bangkrut’ karena tabungannya habis hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>264</sup>

Kelompok oposisi di parlemen menekan Yeltsin untuk memecat Yegor Gaidar – yang pada bulan Juni menjadi Perdana Menteri *ad interim* – yang dianggap paling bertanggung jawab atas kondisi ini. Yeltsin akhirnya menyerah dan mengganti Gaidar dengan Viktor Chernomyrdin pada bulan Desember 1992. Naiknya Chernomyrdin – yang sebelumnya menjabat Menteri Energi dan kepala perusahaan gas negara Gazprom – mendapat dukungan luas di parlemen karena dianggap sebagai tokoh yang tidak terlampau pro-Barat.<sup>265</sup> Chernomyrdin sendiri mendukung ekonomi pasar namun menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh sampai menyebabkan rakyat mengalami kesusahan; oleh karena itu walaupun program terapi kejut secara praktis dihentikan namun pada hakikatnya yang diakhiri hanyalah bagian ‘kejut’-nya saja karena esensi dari program tersebut masih tetap berjalan. Chernomyrdin tetap mempertahankan privatisasi dan liberalisasi harga yang diikuti oleh kebijakan *tight money policy* untuk mengatasi inflasi.<sup>266</sup>

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.1, selama masa jabatan Chernomyrdin – dari Desember 1992 hingga Maret 1998 – inflasi memang berhasil dikendalikan, namun secara keseluruhan perekonomian Rusia mengalami depresi akibat kebijakan neo-liberal yang diterapkan oleh Yeltsin. Dampak negatif lain dari kondisi ekonomi Rusia pada masa ini adalah melebarnya kesenjangan antara miskin dan kaya, yaitu sekelompok kecil masyarakat yang mampu menarik keuntungan dalam situasi yang serba sulit. Kelompok ini terdiri dari individu-individu yang memanfaatkan privatisasi dan pasar finansial dunia untuk menumpuk kekayaan dan menguasai aset-aset negara. Kelompok ini kemudian disebut dengan istilah ‘oligarki’ dan secara praktis menguasai ekonomi dan bahkan politik Rusia. Pengusaha-pengusaha seperti Mikhail Khodorkovsky, Boris Berezovsky, Vladimir Potanin dan Roman Abramovich menjadi pemilik jaringan bisnis yang antara lain meliputi industri migas, industri pertambangan, perbankan,

---

<sup>264</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 293.

<sup>265</sup> Kotz & Weir, *op. cit.*, h. 196.

<sup>266</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 294.

transportasi, dan media massa.<sup>267</sup> Pengaruh para oligarki dalam politik juga semakin terasa; kemenangan Yeltsin pada pemilihan umum 1996 antara lain adalah berkat dukungan finansial yang diberikan para oligarki. Dukungan ini dibalas Yeltsin dengan penempatan beberapa oligarki dalam pemerintahan seperti Berezovsky (sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Nasional) dan Potanin (sebagai deputi perdana menteri untuk urusan ekonomi).<sup>268</sup>

Depresi ekonomi yang dialami Rusia mencapai titik nadirnya pada bulan Agustus 1998 ketika pemerintah mengumumkan bahwa Rusia tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya dan akan mendevaluasi mata uang rubel. Pengumuman ini mengakibatkan bencana bagi perekonomian Rusia: harga-harga kembali meroket, GDP serta produksi industri menyusut drastis, dan sekali lagi masyarakat menyaksikan tabungannya menguap setelah satu demi satu bank di Rusia mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan gulung tikar.<sup>269</sup> Krisis ini merupakan pukulan terakhir terhadap kredibilitas Yeltsin dan kebijakan neo-liberalisme yang diusungnya serta merupakan awal dari akhir pemerintahan Yeltsin. Kesehatan yang semakin memburuk dan gaya kepemimpinannya yang selalu berubah-ubah mempersulit upaya Yeltsin untuk mempertahankan pemerintahannya; dalam periode 1998-1999 Yeltsin mengganti perdana menteri sebanyak 4 kali sebelum mengisi jabatan tersebut dengan Vladimir Putin pada bulan Agustus 1999. Yeltsin rupanya melihat Putin sebagai penerus yang ideal sehingga pada tanggal 31 Desember 1999 Yeltsin mengumumkan pengunduran dirinya dan menunjuk Putin sebagai Presiden *ad interim* hingga pemilihan umum pada bulan Maret 2000.

---

<sup>267</sup> Kotz & Weir, *op. cit.*, h. 219-220.

<sup>268</sup> *Ibid.*, h. 265.

<sup>269</sup> *Ibid.*, h. 236.

**Tabel 3.2 Kinerja Perekonomian Rusia 2000-2007**

Tahun	Perubahan GDP dibandingkan tahun sebelumnya (dalam %)	Produksi industri (dalam %)	Inflasi (dalam %)
2000	10,0	9,3	20,2
2001	5,1	4,9	18,6
2002	4,7	3,7	14,0
2003	7,4	7,0	12,0
2004	7,1	7,3	11,7
2005	6,4	4,0	10,9
2006	6,9	3,9	9,0
2007	7,6	6,5	11,9

Sumber: Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*, h. 299

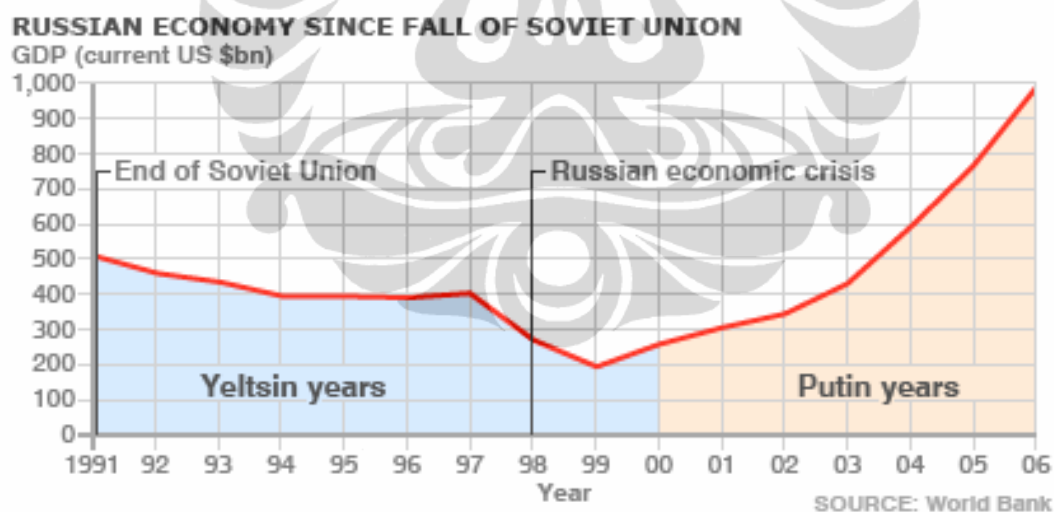
Dua periode pemerintahan Putin ditandai dengan kebangkitan ekonomi Rusia; tabel 3.2 menunjukkan bahwa mulai tahun 2000 indikator ekonomi Rusia menunjukkan tren ke arah yang positif. Keberhasilan Putin ini antara lain berkat keuntungan besar yang diperoleh dari kenaikan harga minyak dunia dan kebijakan Putin yang memperkuat peran negara dalam urusan perekonomian. Kebijakan ini bertolak dari pandangan Putin yaitu bahwa 1) negara harus mengontrol kekayaan; 2) sektor strategis harus dilindungi dari dominasi asing dan dilindungi dari arus globalisasi yang merugikan; dan 3) oligarki harus dihapus sebagai kelas.<sup>270</sup> Sepak terjang oligarki membuat para pengamat menyebut sistem ekonomi Rusia sebagai 'kapitalisme kriminal' atau 'kleptokrasi'.<sup>271</sup> Putin mengakhiri penjarahan yang dilakukan oligarki terhadap kekayaan negara dengan menindak oligarki yang tidak mau tunduk pada negara. Beberapa dari mereka yang menolak melakukannya ditindak dengan keras: Berezovsky dipaksa untuk menyerahkan asetnya kepada

<sup>270</sup> Simon Saragih, *Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB*. Jakarta: Kompas, 2008, h. 72.

<sup>271</sup> Kotz & Weir, *op. cit.*, h. 221.

negara dan kemudian memilih untuk mengasingkan diri ke Inggris sementara Khodorkovsky ditangkap, diadili dan divonis 9 tahun penjara atas dakwaan penipuan, penggelapan uang dan penghindaran pajak. Walaupun tindakan Putin ini dikecam oleh negara-negara Barat dan kelompok-kelompok liberal dalam Rusia sendiri, Putin tetap didukung oleh mayoritas rakyat yang sudah muak dengan kelakuan para oligarki.<sup>272</sup>

Perekonomian Rusia pada periode pemerintahan Yeltsin seperti melangkah dari satu krisis ke krisis yang berikutnya. Kondisi ini menyebabkan jatuhnya prestise Rusia terutama karena *derzhavnost* dipersepsikan sebagai aspirasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>273</sup> Rakyat Rusia merasa malu atas sikap Yeltsin yang dianggap menjatuhkan harga diri bangsa dengan ‘mengemis’ bantuan dari negara-negara Barat<sup>274</sup>, sementara di luar negeri Rusia dicemooh sebagai ‘orang sakit Eropa’ (*the sick man of Europe*) yang dianggap hanya bisa bertahan hidup berkat bantuan dana dari negara-negara Barat.<sup>275</sup>



**Gambar 3.1 Ekonomi Rusia sejak Keruntuhan Uni Soviet**

Sumber: Situs BBC News (<http://news.bbc.co.uk>) berdasarkan data Bank Dunia

<sup>272</sup> *Ibid.*, h. 276.

<sup>273</sup> Sakwa, ‘New Cold War’, h. 242; lihat juga Trenin, ‘Russia’s Strategic Choices’, h. 3.

<sup>274</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 112.

<sup>275</sup> Edward Lucas, *The New Cold War: Putin’s Russia and the Threat to the West*, New York: Palgrave Macmillan, 2008, h. 7.

Kondisi ini baru membaik setelah Putin memegang kendali pemerintahan Rusia. Kebangkitan ekonomi Rusia di bawah Putin menyebabkan kembalinya rasa percaya diri Rusia terhadap peran dan posisinya di komunitas dunia.<sup>276</sup> Kebangkitan ini diakui oleh majalah *TIME* yang menobatkan Vladimir Putin sebagai *Person of the Year* tahun 2007. Alasannya adalah seperti yang ditulis oleh editor majalah tersebut yaitu: “*In [2007]...one nation that had fallen off our mental map, led by one steely and determined man, emerged as a critical linchpin of the 21<sup>st</sup> century.*”<sup>277</sup> Rusia telah bangkit dari keterpurukannya dan saat ini menjadi aktor internasional yang lebih asertif dan independen *vis-à-vis* negara-negara Barat.

### 3.2.2 Kekuatan dan Kemampuan Militer

Secara topografis Rusia didominasi oleh dataran rata dengan perbukitan rendah di sebelah barat dari pegunungan Ural. Pegunungan yang membentang dari utara ke selatan ini secara praktis membagi wilayah Rusia menjadi bagian Eropa dan bagian Asia. Sebelah timur pegunungan Ural adalah dataran Siberia yang sangat luas, sementara di bagian barat daya terdapat pegunungan Kaukasus yang sekaligus menjadi batas antara Rusia dengan Georgia.

Dataran yang luas dan terbuka ini serta minimnya gunung ataupun bentuk pertahanan alamiah lainnya membuat Rusia relatif sulit untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Sejarah Rusia penuh dengan perang dan penaklukan bahkan sebelum terbentuknya kekaisaran Rusia. Pada abad ke-13 Masehi kerajaan Rus yang berpusat di kota Kiev dan meliputi wilayah Ukraina dan Rusia bagian barat ditaklukkan oleh pasukan invasi Tatar (Mongol) dari timur. Pada awal abad ke-19 Rusia memanfaatkan luas wilayah dan cuaca untuk membuat Napoleon I membayar mahal atas pendudukannya terhadap Moskow. Dan pada tahun 1941 pasukan Nazi Jerman mengalami kemenangan demi kemenangan sebelum mesin-perang mereka terhambat oleh lumpur dan salju. Faktor inilah yang membuat pemimpin dan rakyat Rusia selalu mengkhawatirkan keamanan negaranya; kekhawatiran ini kemudian dimanifestasikan dalam kebijakan

<sup>276</sup> Sakwa, *Russian Politics*, h. 382.

<sup>277</sup> Richard Stengel, “Choosing Order Before Freedom”, *TIME Asia* 31 Desember 2007-7 Januari 2008, h. 22.

Kekaisaran Rusia maupun Uni Soviet untuk melakukan ekspansi dan menetralsisir musuh-musuh potensial di sekeliling wilayah teritorialnya.<sup>278</sup>

Pada masa jayanya Uni Soviet memiliki angkatan bersenjata yang termasuk paling kuat di seluruh dunia. Di penghujung dekade 80-an kekuatan militer konvensional Soviet lebih besar dua kali lipat dibandingkan kekuatan militer konvensional dari seluruh negara-negara anggota NATO.<sup>279</sup> Uni Soviet mengalokasikan 15 hingga 20 persen dari GDP-nya untuk mempertahankan kekuatan militer ini.<sup>280</sup> Richard Sakwa mengatakan: “*Not only were economic resources diverted towards supporting the country’s enormous military establishment, but the system of conscription and patriotic education made the military the cornerstone of national identity.*”<sup>281</sup> Status Uni Soviet sebagai *superpower* antara lain disebabkan oleh kekuatan militernya yang luar biasa dan persepsi Barat bahwa kekuatan tersebut cukup besar untuk menaklukkan Eropa, mendominasi Eurasia, dan mengalahkan Amerika Serikat dalam kompetisi global.<sup>282</sup>

Supremasi militer ini berakhir seiring dengan keruntuhan Uni Soviet. Rusia sebagai penerus Uni Soviet tidak hanya mewarisi sebagian besar peralatan militer Uni Soviet – termasuk arsenal nuklirnya – namun juga mewarisi masalah-masalah yang dihadapi Uni Soviet menjelang akhir hidupnya. Steven Miller menyebut empat masalah krusial yang dihadapi militer Rusia paska-Soviet, yaitu:

- 1) Kondisi yang memburuk (*deteriorating forces*). Rusia ternyata mewarisi angkatan bersenjata yang sedang mengalami kemunduran baik dari segi moral maupun material.<sup>283</sup> Kondisi ini dimulai sejak reformasi yang dicanangkan Gorbachev pada pertengahan tahun 80-an dan hingga kini masih menghantui militer Rusia. Kemunduran militer Rusia menciptakan masalah-masalah seperti *morale* dan disiplin tentara yang merosot, tingkat

<sup>278</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 18.

<sup>279</sup> Alexei G. Arbatov, “The Transformation of Russian Military Doctrine: Lessons Learned from Kosovo and Chechnya”, *The Marshall Center Papers No. 2*, Juli 2000, h. 5.

<sup>280</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 392.

<sup>281</sup> *Ibid.*

<sup>282</sup> Steven E. Miller, “Moscow’s Military Power: Russia’s Search for Security in an Age of Transition”, dalam Steven E. Miller & Dmitry Trenin (eds.), *The Russian Military: Power and Policy*, Cambridge, MA: American Academy of Arts and Sciences, 2004, h. 1.

<sup>283</sup> *Ibid.*, h. 8.



desersi yang tinggi, tingkat rekrutmen yang rendah, korupsi yang merajalela dan kemampuan tempur yang menurun drastis.<sup>284</sup>

- 2) Gelar pasukan yang tidak tepat (*maldeployed forces*). Pada saat Perang Dingin, satuan-satuan tempur Uni Soviet digelar di Eropa Timur, yaitu di wilayah teritorial sekutu-sekutu Soviet yang tergabung dalam Pakta Warsawa, dan di wilayah yang sekarang menjadi *near abroad*. Namun setelah disintegrasi Uni Soviet, pasukan ini dipindahkan dari garis depan dalam apa yang disebut oleh Sherman Garnett sebagai “penarikan mundur strategis terbesar dalam sejarah”<sup>285</sup> dan kemudian ditempatkan di lokasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan logistik ketimbang strategis. Sebagai akibatnya kemampuan tempur dari sejumlah satuan elit tersia-siakan di tempat yang jauh dari garis depan, persenjataan dan perlengkapan militer banyak yang ditinggal (atau dijual), dan tidak jarang penempatan baru mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti pangkalan militer atau bahkan barak untuk para prajurit.<sup>286</sup>
- 3) Pengeluaran pertahanan yang anjlok (*collapse of defense spending*). Krisis yang melanda perekonomian Rusia pada dekade 90-an turut menyebabkan penurunan anggaran pertahanan negara secara drastis. Pada akhir tahun 90-an pengeluaran pertahanan Rusia mencapai kurang dari 10 persen dari pengeluaran pertahanan Uni Soviet sekitar satu dekade sebelumnya.<sup>287</sup> Rusia tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan militernya yang sangat besar, dan sebagai akibatnya militer Rusia mengalami penurunan kekuatan dan kemampuan yang ditunjukkan dalam penurunan volume pembelian dan peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), pengurangan jumlah dan durasi latihan militer, dan keterbatasan bahan bakar serta suku cadang untuk alutsista ketiga angkatan.<sup>288</sup> Personil militer Rusia mengalami penurunan terhadap standar

<sup>284</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>285</sup> Sherman Garnett, “Russia’s Illusory Ambitions”, *Foreign Affairs* 76:2 (Maret-April 1997), h. 62; terjemahan oleh penulis.

<sup>286</sup> Miller, *op. cit.*, h. 9-10.

<sup>287</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>288</sup> Benjamin S. Lambeth, “Russia’s Wounded Military”, *Foreign Affairs* 74:2 (Maret-April 1995), h. 88-89.

hidup, prestise, dan kesiapan tempur mereka.<sup>289</sup> Pengurangan anggaran pertahanan juga mengakibatkan reduksi jumlah prajurit: jumlah tentara reguler Rusia menyusut dari sekitar 2,73 juta orang pada pertengahan tahun 1992 menjadi sekitar 1,13 juta pada awal tahun 2004.<sup>290</sup>

- 4) Industri pertahanan yang mahal (*unaffordable defense industry*). Keunggulan militer Uni Soviet secara strategis dan taktis atas NATO pada dekade 80-an merupakan hasil dari apa yang disebut Vitaly Shlykov sebagai ‘militerisasi struktural’ terhadap perekonomian negara. Istilah ini merujuk kepada kebijakan ekonomi makro Uni Soviet dimana seluruh sektor perekonomian dikerahkan untuk mendukung industri pertahanan negara dalam kompetisi jangka panjang dengan Barat.<sup>291</sup> Semua teknologi serta sumber daya alam dan manusia terbaik disalurkan ke sektor pertahanan sementara sektor sipil dan infrastruktur ekonomi diabaikan begitu saja sehingga menderita ketidakefisienan kronis.<sup>292</sup> Selama periode ini industri pertahanan Soviet mampu memproduksi persenjataan dan perlengkapan militer dalam jumlah yang besar serta menempati posisi yang sangat diistimewakan dimana kebutuhannya yang sangat tinggi (terutama akan dana) diberi prioritas utama oleh pemerintah.<sup>293</sup> Anjloknya pengeluaran pertahanan Rusia mempengaruhi kemampuan Rusia untuk memanfaatkan industri pertahanan raksasa ini; dengan kata lain, Rusia mewarisi kemampuan untuk memproduksi persenjataan yang sejatinya tidak diperlukan dalam situasi dan kondisi dunia paska-Perang Dingin dan tidak mampu untuk dibeli oleh karena anggaran pertahanan yang menyusut tajam.<sup>294</sup>

---

<sup>289</sup> *Ibid.*, h. 91.

<sup>290</sup> Dmitry Trenin, “Gold Eagle, Red Star”, dalam Steven E. Miller & Dmitry Trenin (eds.), *The Russian Military: Power and Policy*, Cambridge, MA: American Academy of Arts and Sciences, 2004, h. 218.

<sup>291</sup> Vitaly V. Shlykov, “The Economics of Defense in Russia and the Legacy of Structural Militarization”, dalam Steven E. Miller & Dmitry Trenin (eds.), *The Russian Military: Power and Policy*, Cambridge, MA: American Academy of Arts and Sciences, 2004, h. 158.

<sup>292</sup> *Ibid.*, h. 159.

<sup>293</sup> Miller, *op. cit.*, h. 12.

<sup>294</sup> *Ibid.*

Selain keempat masalah di atas, Rusia juga menghadapi masalah perihal pembagian persenjataan dan infrastruktur militer bekas Uni Soviet dengan negara-negara CIS lainnya. Dalam beberapa kasus masalah ini mengakibatkan sengketa internasional; salah satunya adalah dengan Ukraina seputar klaim atas Armada Laut Hitam yang berbasis di kota Sevastopol di Semenanjung Krimea.<sup>295</sup> Armada ini terdiri dari sekitar 300 kapal dan merupakan salah satu dari empat armada yang dimiliki Uni Soviet. Sengketa ini nyaris menciptakan konflik antara kedua negara namun berhasil diselesaikan dengan damai berkat negosiasi tingkat tinggi antara Yeltsin dengan presiden Ukraina Leonid Kuchma pada tahun 1997.<sup>296</sup>

Penurunan kekuatan dan kemampuan militer Rusia ditunjukkan dengan sangat dramatis oleh peristiwa yang menimpa kapal selam K-141 *Kursk*. *Kursk* adalah kapal selam serang nuklir dari kelas *Antei* (kode NATO: *Oscar-II*) yang diluncurkan pada tahun 1994 dan menjadi kebanggaan Angkatan Laut Rusia. Dalam sebuah latihan maritim di Laut Barents pada tanggal 12 Agustus 2000, *Kursk* mengalami kecelakaan yang fatal ketika sebuah torpedo meledak secara prematur dan menghancurkan bagian haluan kapal. Ledakan ini seketika menenggelamkan *Kursk* dan menyebabkan kematian seluruh awaknya.<sup>297</sup> Minimnya anggaran, standar perawatan peralatan perang yang buruk, dan tingkat keahlian pasukan yang rendah berkontribusi pada terjadinya salah satu tragedi terburuk dalam sejarah militer Rusia ini.<sup>298</sup>

Penurunan kekuatan dan kemampuan militer Rusia juga ditunjukkan oleh konflik di Chechnya yang berlangsung dari tahun 1994 hingga 1996. Chechnya adalah sebuah republik otonom di bawah Federasi Rusia yang terletak di Kaukasus Utara dan berbatasan langsung dengan Georgia di bagian selatan. Pada bulan November 1991 presiden Djokhar Dudayev – yang sebelumnya merupakan seorang perwira tinggi di Angkatan Udara Uni Soviet – mendeklarasikan kemerdekaan Chechnya dan pemutusan segala hubungan dengan Uni Soviet.

---

<sup>295</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 398; Semenanjung Krimea adalah tujuan liburan yang sangat populer sejak masa Uni Soviet dan termasuk daerah yang memiliki nilai historis dan sentimental bagi Rusia. Mayoritas penduduk Rusia masih menyimpan rasa amarah terhadap Nikita Krushchev yang secara sepihak ‘menghadiahkan’ Krimea kepada Ukraina pada tahun 1954.

<sup>296</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 162.

<sup>297</sup> Zoltan Barany, *Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military*, New Jersey: Princeton University Press, 2007, h. 22.

<sup>298</sup> *Ibid.*, h. 42.

Kemerdekaan ini tidak diakui oleh Rusia dan Dudayev dianggap telah melakukan pemberontakan terhadap Rusia.<sup>299</sup> Seminggu setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, Yeltsin mengirim pasukan Rusia ke Grozny – ibukota Chechnya – untuk menangkap Dudayev; upaya ini mengalami kegagalan berkat perlawanan yang diberikan oleh pendukung Dudayev dan penolakan parlemen Rusia terhadap tindakan Yeltsin.<sup>300</sup> Selama 3 tahun berikutnya Chechnya menikmati kemerdekaan secara *de facto* dari Rusia sementara Yeltsin melakukan segala cara yang memungkinkan (di luar serangan militer langsung) untuk menggusur Dudayev, termasuk menjatuhkan sanksi dan blokade ekonomi terhadap Chechnya serta memberikan dukungan moral dan material kepada kelompok oposisi.<sup>301</sup> Cara-cara ini juga mengalami kegagalan sehingga pada bulan Desember 1994 Yeltsin memutuskan untuk mengirim pasukan dengan jumlah yang lebih besar untuk menguasai Grozny dan mengganti Dudayev secara paksa.

Di atas kertas Rusia memiliki keunggulan yang jauh melebihi Chechnya. Dari segi kuantitas, jumlah pasukan Rusia 15 kali lipat lebih besar daripada pasukan Chechnya.<sup>302</sup> Dari segi kualitas, Rusia memiliki persenjataan yang (relatif) modern termasuk helikopter dan pesawat tempur melawan pasukan Chechen yang hanya memiliki kemampuan perang darat. Banyak pengamat yang sependapat dengan estimasi yang diberikan oleh pejabat militer Rusia seperti Menteri Pertahanan Pavel Grachev bahwa Grozny akan jatuh hanya dalam hitungan hari.<sup>303</sup> Pada kenyataannya Chechnya melancarkan perang gerilya yang sangat efektif yang kemudian menghasilkan salah satu kekalahan militer yang paling memalukan dalam sejarah Rusia, bahkan melebihi kekalahan sebelumnya di Afghanistan. Seperti di perang tersebut, angkatan bersenjata Rusia tidak mampu menaklukkan gerilyawan Chechen yang walaupun sangat kalah jumlah namun mengenal dan menguasai medan dengan baik serta mendapat dukungan dari rakyat setempat.

<sup>299</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 200.

<sup>300</sup> Svante E. Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, London: RoutledgeCurzon, 2001, h. 199.

<sup>301</sup> *Ibid.*

<sup>302</sup> Anatol Lieven, *Chechnya: Tombstone of Russian Power*, New Haven: Yale University Press, 1998, h. 4.

<sup>303</sup> Cornell, *op. cit.*, h. 185.

Militer Rusia sepertinya telah melupakan pelajaran dari Afghanistan tentang perang gerilya dan mengulangi taktik ‘perang besar’ seperti penggunaan meriam artileri dan pengeboman udara untuk menaklukkan Grozny. Tentara Rusia berhasil merebut Grozny setelah dikepung selama 2 bulan namun dengan biaya yang sangat mahal: ribuan tentara Rusia tewas dan terluka-luka, 20.000 korban sipil tewas, dan kehancuran Grozny secara total.<sup>304</sup> Sebuah tim pencari fakta OSCE melaporkan bahwa kondisi Grozny bagaikan Stalingrad paska-kepungan Nazi Jerman pada Perang Dunia II.<sup>305</sup> Tentara Rusia dituding telah melakukan pelanggaran berat HAM terhadap populasi sipil Chechnya, dan 72 persen publik Rusia mengungkapkan ketidaksetujuannya atas kebijakan Moskow terhadap perang ini dalam sebuah survei nasional yang dilakukan pada awal tahun 1995.<sup>306</sup> Oposisi terhadap perang semakin menguat setelah pemerintah gagal mengantisipasi dan mengatasi serangan teroris Chechen terhadap sebuah rumah sakit di Rusia pada pertengahan tahun 1995 dan setelah tentara Rusia gagal mempertahankan Grozny dari serangan balik gerilyawan Chechen pada pertengahan bulan Agustus 1996. Setelah mengamati situasi di lapangan, utusan presiden Yeltsin untuk Chechnya, mantan jenderal Aleksandr Lebed, menyimpulkan bahwa konflik ini tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan militer dan bahwa Rusia harus mundur dari Chechnya.<sup>307</sup>

Perang Chechnya berakhir secara *de facto* pada tanggal 31 Agustus 1996 setelah negosiasi Lebed dengan utusan Chechen Aslan Maskhadov<sup>308</sup> menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Rusia dari Chechnya. Secara *de jure* perang ini berakhir pada bulan Mei 1997 setelah Yeltsin dan Maskhadov menandatangani perjanjian damai antara Rusia dengan Republik Ichkeria-Chechnya yang berisi penolakan terhadap penggunaan ataupun ancaman kekuatan untuk mengatasi konflik dan kesepakatan untuk membina hubungan antara Moskow dan Grozny berdasarkan prinsip dan norma hukum

---

<sup>304</sup> *Ibid.*, h. 214.

<sup>305</sup> Matthew Evangelista, *The Chechen Wars: Will Russia Go the Way of the Soviet Union?*, Washington, DC: Brookings Institution Press, 2002, h. 144.

<sup>306</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 201.

<sup>307</sup> Cornell, *op. cit.*, h. 218.

<sup>308</sup> Pada bulan Januari 1997 Maskhadov memenangkan pemilu di Chechnya dan dilantik sebagai presiden menggantikan Zelimkhan Yandarbiev yang sebelumnya menggantikan Djokhar Dudayev yang tewas akibat serangan helikopter Rusia pada bulan April 1996.

internasional.<sup>309</sup> Perjanjian ini merupakan pengakuan implisit Rusia terhadap kemerdekaan *de facto* Chechnya dan kekalahan Rusia secara militer. Kekalahan ini mengekspos kelemahan angkatan bersenjata Rusia dalam melakukan operasi perang dan menyebabkan kredibilitas serta prestise militer Rusia jatuh ke titik nadir.<sup>310</sup>

Kondisi ini bertahan hingga terjadinya intervensi militer Amerika Serikat dan NATO terhadap Yugoslavia pada bulan Maret-April 1999. NATO melancarkan serangan udara selama 78 hari untuk memaksa presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic agar menghentikan 'genosida' yang dilakukan terhadap etnis Albania di Kosovo. Pada akhirnya intervensi NATO ini 'berhasil' mencapai tujuannya tersebut namun di bagi Rusia peristiwa ini menyebabkan perubahan yang sangat signifikan terutama dalam lingkup militer. Peristiwa Kosovo membangkitkan kembali ketakutan Rusia terhadap NATO dan mengubah pandangan Rusia terhadap penggunaan kekuatan militer sebagai solusi terhadap permasalahan keamanan yang dihadapi.<sup>311</sup> Dampak yang paling nyata dari perubahan ini adalah keputusan Rusia untuk melanjutkan konfliknya dengan Chechnya. Perang Chechnya II (1999-2009) terjadi setelah sejumlah gerilyawan Chechen menyeberang perbatasan dan menginvasi republik otonom Dagestan pada bulan Agustus 1999. Rusia mengirim pasukannya untuk membantu Dagestan lalu kemudian melanjutkan operasi militer terhadap Chechnya.

Dari sudut pandang Rusia, tindakan NATO di Kosovo merupakan justifikasi terhadap apa yang dilakukannya pada perang Chechnya I dan memberikan beberapa pelajaran penting, yaitu: 1) angkatan bersenjata bisa dan boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah domestik; 2) penggunaan kekuatan adalah solusi yang paling efektif untuk permasalahan apapun; 3) legalitas tindakan menurut hukum internasional atau isu HAM berada di bawah tujuan negara; 4) penggunaan kekuatan secara besar-besaran yang bisa menyebabkan jatuhnya korban sipil maupun kerusakan infrastruktur dapat dibenarkan demi melindungi nyawa pasukannya sendiri; dan 5) opini dan posisi

---

<sup>309</sup> Evangelista, *op. cit.*, h. 85.

<sup>310</sup> Donaldson & Noguee, *loc. cit.*

<sup>311</sup> Alexei G. Arbatov, "The Transformation of Russian Military Doctrine: Lessons Learned from Kosovo and Chechnya", *The Marshall Center Papers No. 2*, Juli 2000, h. 20.

pemerintah maupun publik asing (terutama Barat) dapat dikesampingkan apabila berseberangan dengan kepentingan nasional Rusia.<sup>312</sup>

Pelajaran-pelajaran ini memberikan semangat baru bagi Rusia untuk melancarkan perang Chechnya II. Angkatan bersenjata Rusia rupanya telah pulih dari krisis kekuatan dan kemampuan yang menghantuinya sejak perang Chechnya I. Dmitry Trenin mengatakan bahwa pemikiran strategis militer Rusia telah kembali mengadopsi dasar-dasar *Realpolitik* dan “mundur sekitar 100-120 tahun ke belakang di saat lingkungan pra-Perang Dunia I [yang ditandai] dengan persaingan sengit di antara kekuatan-kekuatan besar [Eropa].”<sup>313</sup> Menurut pemikiran ini, setiap negara akan selalu berusaha untuk mempengaruhi negara lainnya dengan mengandalkan kekuatan yang dimilikinya, dan kekuatan militer adalah instrumen yang ampuh untuk memajukan kepentingan nasional suatu negara.<sup>314</sup> Oleh sebab itu, dilihat dari sudut pandang ini maka intervensi militer Rusia terhadap Georgia merupakan upaya Rusia untuk menunjukkan bahwa: 1) kekuatan dan kemampuan militernya telah berhasil bangkit dari krisis yang dialaminya sejak keruntuhan Uni Soviet, dan 2) bahwa intervensi militer adalah cara yang paling efektif untuk mengakhiri konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan secara tuntas.

### 3.2.3 Perluasan NATO ke Timur

Serangan udara NATO terhadap Yugoslavia di Kosovo merupakan titik rendah dalam hubungan antara Rusia dengan organisasi yang dahulu merupakan musuh utamanya. Namun demikian, walaupun permusuhan tersebut berubah menjadi persahabatan setelah berakhirnya Perang Dingin, persahabatan itu diwarnai ketegangan-ketegangan seperti Kosovo, pertanyaan seputar relevansi NATO paska-Perang Dingin, dan terutama perluasan keanggotaan NATO ke timur. Pada tahun 1999 NATO menerima Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko sebagai anggota baru dan kemudian pada tahun 2004 ketiga negara Baltik bekas Uni Soviet (Lithuania, Latvia dan Estonia) beserta Bulgaria, Rumania, Slovakia

<sup>312</sup> *Ibid.*, h. 20-21.

<sup>313</sup> Dmitry Trenin, “Russia’s Threat Perception and Strategic Posture”, dalam R. Craig Nation & Dmitry Trenin, *Russian Security Strategy Under Putin: U.S. and Russian Perspectives*, Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, November 2007, h. 35-36.

<sup>314</sup> *Ibid.*, h. 35.

dan Slovenia turut bergabung ke dalam NATO. Secara resmi Rusia tidak menunjukkan penolakannya terhadap perluasan tersebut; pada bulan Mei 2002 Kepala Staf AB Rusia Yuri Baluyevsky mengatakan bahwa Rusia “tidak takut menghadapi perluasan NATO apabila para anggota baru tidak mengancam keamanan nasional [Rusia] dan menggunakan infrastruktur [NATO] untuk menggelar persenjataan strategis.”<sup>315</sup> Namun demikian perluasan NATO secara implisit menimbulkan pertanyaan: apakah Barat sudah menjadi mitra penuh bagi Rusia ataukah masih dianggap sebagai ancaman? Begitu pula sebaliknya, apakah Rusia sudah menjadi kawan atau masih sebagai lawan?<sup>316</sup>

Hubungan Rusia-NATO setelah akhir Perang Dingin dimulai menjelang detik-detik terakhir ‘kematian’ Uni Soviet. Pada bulan Desember 1991 NATO meresmikan *North Atlantic Cooperation Council* atau NACC sebagai forum untuk dialog politik, konsultasi, dan kerja sama dalam rangka menjalin hubungan yang baru dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur.<sup>317</sup> NACC (yang kemudian diganti namanya menjadi *Euro-Atlantic Partnership Council* atau EAPC) merupakan langkah awal dalam menjalin hubungan yang baik antara NATO dengan Rusia ke depan. Hubungan ini diperkuat oleh presiden AS (pada waktu itu) Bill Clinton dalam program Kemitraan untuk Perdamaian (*Partnership for Peace* atau PfP) yang ditujukan kepada negara-negara bekas Uni Soviet dan Pakta Warsawa. PfP ditujukan sebagai sebuah program kerja sama pertahanan dan keamanan antara NATO dengan negara-negara Mitra dan sebagai batu loncatan untuk keanggotaan dalam NATO. Tujuan dari PfP antara lain 1) untuk memuaskan kekhawatiran negara-negara Eropa Tengah dan Timur akan keamanan mereka; dan 2) untuk mencegah destabilisasi Rusia yang sedang mengalami krisis domestik.<sup>318</sup>

Hubungan Rusia-NATO naik ke tingkat yang lebih formal pada tahun 1997 ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian *NATO-Russia Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security* pada bulan Mei.

<sup>315</sup> Dikutip dalam Gordon B. Hendrickson, “The Future of NATO-Russia Relations (Or, How to Dance with a Bear and Not Get Mauled)”, *The Atlantic Council of the United States Occasional Paper*, Desember 2005, h. 12; terjemahan oleh penulis.

<sup>316</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 414.

<sup>317</sup> Hendrickson, *op. cit.*, h. 2.

<sup>318</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 214.



Perjanjian ini antara lain menjadi dasar pembentukan *Permanent Joint Council* (PJC) antara NATO dengan Rusia yang memiliki misi sebagai “...a mechanism for consultation, coordination, and, to the maximum extent possible, where appropriate, for joint decisions and joint action with respect to security issues of common concern.”<sup>319</sup> Rusia membuka misi diplomatik dengan NATO dan kedua pihak melakukan konsultasi secara berkala mengenai isu-isu keamanan bersama.<sup>320</sup> Peristiwa 9/11 dan pencanangan ‘perang melawan teror’ menciptakan ancaman terhadap keamanan yang mengharuskan kerja sama yang lebih erat dengan Rusia. PJC dianggap masih memiliki kekurangan sehingga dalam KTT Roma pada tahun 2002 dibentuklah *NATO-Russia Council* (NRC) dimana kedua belah pihak berada dalam posisi yang sejajar untuk mengidentifikasi dan mengejar kesempatan-kesempatan untuk melakukan tindakan bersama, konsultasi berkala mengenai isu-isu keamanan kontemporer dan pengembangan terhadap kerja sama praktis dalam wilayah yang menjadi kepentingan bersama.<sup>321</sup> Menurut ketentuan Deklarasi Roma, tujuan NRC adalah:

*“The NATO-Russia Council will provide a mechanism for consultation, consensus-building, cooperation, joint decision, and joint action for the member states of NATO and Russia on a wide spectrum of security issues in the Euro-Atlantic region. The NATO-Russia Council will serve as the principal structure and venue for advancing the relationship between NATO and Russia. It will operate on the principle of consensus...NATO member states and Russia will continue to intensify their cooperation in areas including the struggle against terrorism, crisis management, non-proliferation, arms control and confidence-building measures, theater missile defense, search and rescue at sea, military-to-military cooperation, and civil emergencies.”*<sup>322</sup>

Tujuan yang sangat ambisius ini dan hubungan Rusia-NATO yang sepertinya sangat harmonis menutupi ketegangan diantara keduanya. Inti dari ketegangan ini adalah pertanyaan yang diajukan pada awal bagian ini, yaitu bagaimanakah posisi Rusia *vis-à-vis* NATO? Sebagian besar publik Rusia melihat NATO sebagai produk Perang Dingin yang menjadi musuh utama Rusia/Uni

<sup>319</sup> Dikutip dalam Sakwa, *op. cit.*, h. 418.

<sup>320</sup> Hendrickson, *op. cit.*, h. 4.

<sup>321</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>322</sup> Dikutip dalam *ibid.*

Soviet selama lebih dari 40 tahun. Menurut seorang pejabat NATO, banyak orang Rusia yang menganggap NATO sebagai sebuah “sisa dari Perang Dingin yang ilegal dan didominasi Amerika Serikat serta sebuah blok militer yang memiliki potensi agresif yang mana dunia akan menjadi lebih baik tanpanya.”<sup>323</sup> Oleh karena itu, perluasan NATO dianggap sebagai upaya NATO untuk mengambil kesempatan dari kelemahan domestik Rusia yang ditutupi oleh tujuan-tujuan yang ambisius.<sup>324</sup>

Perluasan NATO telah menjadi ‘duri dalam daging’ dalam hubungan keduanya sejak 1993. Pemilu legislatif Rusia pada tahun itu yang didominasi oleh kelompok-kelompok ultranasionalis-komunis menciptakan ketakutan di negara-negara bekas Uni Soviet dan Pakta Warsawa bahwa Rusia akan kembali menjadi seperti Uni Soviet. Oleh karena itu, negara-negara ini mengisyaratkan keinginannya untuk bergabung dengan NATO demi menjamin keamanannya *vis-à-vis* Rusia.<sup>325</sup> NATO menyambut keinginan ini antara lain melalui program PfP yang seketika disetujui oleh Rumania, Lithuania, Estonia, Ukraina, Bulgaria, Latvia, Moldova dan Albania. Walaupun Rusia juga turut bergabung dalam program PfP pada tahun 1995, sikap Rusia ini lebih dikarenakan keinginan Rusia untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan Barat ketimbang alasan-alasan yang lain. Perluasan NATO sejatinya adalah sebuah pukulan telak terhadap kedudukan Rusia; dari sudut pandang Rusia, perluasan NATO akan membahayakan upaya Rusia untuk menjalin hubungan yang baik dengan Eropa secara keseluruhan dan akan mengisyaratkan pengesampingan Rusia dalam keikutsertaan yang sejajar dan setara dalam keamanan Eropa.<sup>326</sup> Kekhawatiran Rusia terhadap perluasan NATO dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>327</sup>:

- 1) Perluasan NATO ke timur menafikan peran organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan OSCE;

<sup>323</sup> Dikutip dalam *ibid.*, h. 8.

<sup>324</sup> Susan Eisenhower, “The Perils of Victory”, dalam Ted Galen Carpenter & Barbara Conry (eds.), *NATO Enlargement: Illusions and Reality*, Washington, DC: The Cato Institute, 1998, h. 103.

<sup>325</sup> Donaldson & Noguee, *loc. cit.*

<sup>326</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 416.

<sup>327</sup> *Ibid.*, h. 416-417.

- 2) Perluasan NATO diikuti oleh pendefinisian ulang peran NATO yang menekankan misi-misi di luar wilayah geografis yang menjadi kewajiban NATO;
- 3) Perluasan melemahkan NATO sendiri dengan mengembalikan garis-garis pembagian dalam Eropa yang tidak lain ditujukan kepada Rusia;
- 4) Perluasan akan menafikan rezim pengendalian senjata (*arms control*) yang berlaku, terutama perjanjian perlucutan senjata seperti Perjanjian *Conventional Forces in Europe* atau CFE.
- 5) Perluasan menyebabkan peningkatan ketegangan keamanan regional terutama setelah masuknya ketiga negara Baltik (Lithuania, Latvia dan Estonia) dimana 30 persen dari penduduknya terdiri dari etnis Rusia.
- 6) Perluasan NATO meningkatkan perasaan isolasi Rusia dan membawa resiko pengesampingan Rusia dari proses pengambilan keputusan di Eropa sehingga dapat mengakibatkan sebuah 'Perang Dingin Baru'.
- 7) Perluasan tidak menghasilkan demiliterisasi kebijakan luar negeri sebagaimana yang diharapkan setelah berakhirnya Perang Dingin; sebaliknya, NATO mengharapakan para anggota baru untuk memberikan 'kontribusi yang memadai' terhadap pertahanan kolektif NATO.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Konsep Keamanan Nasional Rusia, perluasan NATO termasuk ancaman yang dihadapi Rusia. Kalangan militer menilai bahwa perluasan NATO menunjukkan perubahan pada situasi dunia yang semakin tidak menguntungkan bagi Rusia. Evaluasi kalangan militer Rusia menjelang perluasan tahap pertama pada tahun 1999 menyebutkan ancaman-ancaman nyata terhadap keamanan Rusia sebagai berikut<sup>328</sup>:

- 1) Bergabungnya Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia akan membuka akses NATO terhadap sekitar 300 pangkalan udara garis depan sehingga akan meningkatkan potensi kekuatan dan jangkauan serangan udara NATO terhadap wilayah Rusia.

<sup>328</sup> William D. Jackson, "Encircled Again: Russia's Military Assesses Threats in a Post-Soviet World", *Political Science Quarterly* 117:3 (Autumn, 2002), h. 380.

- 2) Senjata taktis NATO memiliki kemampuan strategis sebagai konsekuensi dari peningkatan jangkauan pesawat tempur dan peluru kendali NATO.
- 3) Keanggotaan Polandia saja memberikan NATO akses terhadap fasilitas pelabuhan di Laut Baltik, meningkatkan kekuatan kapal tempur NATO sebesar 18 persen, dan meningkatkan kekuatan patroli udara NATO sebesar 50 persen sehingga menyebabkan kemampuan NATO untuk mendominasi perairan Baltik meningkat secara signifikan.
- 4) Pasukan darat di bawah komando NATO akan bertambah sebanyak 11 divisi dan 38 brigade tempur.
- 5) NATO akan memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana yang memungkinkan penggelaran pasukan NATO ke timur secara cepat.
- 6) Waktu reaksi Rusia terhadap serangan NATO akan berkurang drastis.

Salah satu alasan mengapa Rusia merasa begitu terganggu oleh perluasan NATO dapat dilihat dalam sejarah. Pada tahun 1990 Jerman Barat dan Timur sedang dalam proses penyatuan kembali setelah terpisah selama 45 tahun. Hambatan terbesar atas proses ini adalah dari Uni Soviet; tepatnya Moskow Moskow sangat khawatir terhadap naiknya kekuatan Jerman yang bersatu yang suatu hari nanti dapat menandingi kekuatan Uni Soviet. Namun demikian setelah peristiwa rubuhnya Tembok Berlin Gorbachev menyadari bahwa penyatuan kedua Jerman adalah sebuah kenyataan tidak dapat dihindari lagi.<sup>329</sup> Gorbachev menginginkan jaminan dari Barat bahwa proses ini tidak akan mengganggu keamanan Uni Soviet dan Eropa secara keseluruhan. Gorbachev lalu mensyaratkan Jerman yang netral namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (pada waktu itu) James Baker mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengendalikan Jerman adalah melalui keanggotaan Jerman bersatu dalam NATO.<sup>330</sup> Usulan ini diterima Gorbachev dengan satu syarat: NATO tidak boleh melakukan perluasan ke timur. Menurut Gorbachev, “perpanjangan zona NATO sedikit saja adalah sesuatu yang tidak dapat diterima”.<sup>331</sup> Baker menerima syarat

---

<sup>329</sup> Eisenhower, *op. cit.*, h. 104.

<sup>330</sup> Jerman Barat sudah menjadi anggota NATO sejak 1955.

<sup>331</sup> Dikutip dalam Eisenhower, *op. cit.*, h. 105; terjemahan oleh penulis.

tersebut yang ditegaskan ulang oleh presiden George H. W. Bush sehingga Gorbachev kemudian menarik perlawanannya terhadap penyatuan Jerman.

Sayangnya janji ini tidak pernah dibakukan dalam bentuk yang formal sehingga ketika NATO akhirnya melakukan perluasannya Rusia merasa telah dikhianati oleh Barat (terutama Amerika Serikat).<sup>332</sup> AS menganggap kesepakatan lisan antara Bush dan Gorbachev itu sebagai sebuah ‘kesalahpahaman’ sehingga tidak merasa terikat dengannya.<sup>333</sup> Perselisihan antara Rusia dengan NATO mengenai perang Bosnia dan intervensi di Kosovo menyebabkan hubungan antara keduanya semakin renggang. Keberatan Rusia terhadap perluasan NATO mencapai puncaknya ketika Georgia dan Ukraina mengisyaratkan keinginannya untuk turut bergabung dengan NATO. Bagi Rusia, bergabungnya kedua negara ini dengan NATO merupakan sebuah prospek yang menakutkan karena bila itu terjadi maka garis depan NATO akan bersinggungan secara langsung dengan Rusia.<sup>334</sup> Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan bahwa walaupun negara-negara bekas Uni Soviet memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri namun “masuknya negara-negara seperti Ukraina dan Georgia ke dalam NATO akan menyebabkan pergeseran geopolitik secara kolosal.”<sup>335</sup>

Bagi Georgia, keanggotaan dalam NATO adalah sebuah isu yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya karena menurutnya merupakan satu dari sedikit cara untuk menjamin keamanannya dari Rusia yang semakin hari semakin asertif. Presiden Saakashvili menjadikan keanggotaan dalam NATO sebagai prioritas kebijakan luar negerinya; oleh karena itu sejak awal kepemimpinannya Saakashvili antara lain mengalokasikan anggaran yang substansial untuk modernisasi persenjataan dan perlengkapan militernya agar memenuhi standar NATO.<sup>336</sup> Ia pun tidak melewatkan kesempatan untuk memperjuangkan kebijakan ini kepada publik domestik maupun internasional sehingga pada referendum yang dilakukan pada pertengahan tahun 2008, 77 persen rakyat Georgia mendukung

---

<sup>332</sup> *Ibid.*, h. 107.

<sup>333</sup> International Crisis Group, *Russia vs Georgia: The Fallout* (Europe Report No. 195), Tbilisi/Brussels: ICG, 22 Agustus 2008, h. 11.

<sup>334</sup> *Ibid.*

<sup>335</sup> Sakwa, *op. cit.*, h. 418; terjemahan oleh penulis.

<sup>336</sup> International Crisis Group, *loc. cit.*

keanggotaan Georgia dalam NATO.<sup>337</sup> Keanggotaan Georgia dalam NATO juga mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat; pada bulan April 2008 dalam KTT NATO di Bucharest, Rumania, AS menekan anggota-anggota NATO lainnya untuk menyetujui status *Membership Action Plan* (MAP) untuk Georgia dan juga Ukraina yang sejatinya akan membuat keanggotaan kedua negara ini di dalam NATO semakin dekat dengan kenyataan.<sup>338</sup>

Walaupun pada akhirnya kedua negara tidak berhasil mendapatkan status MAP, kenyataan bahwa usulan itu dibahas dengan serius sudah dianggap sebagai sebuah penghinaan yang luar biasa, sebuah ‘tamparan di muka’ bagi Rusia.<sup>339</sup> Kali ini Rusia merasa perlu untuk menunjukkan secara tegas keberatannya terhadap perluasan NATO. Intervensi militer yang dilakukan terhadap Georgia merupakan pertanda bahwa Rusia tidak akan terus diam dan menerima perluasan NATO ke dalam lingkaran pengaruhnya sebagai sebuah *fait accompli*.

#### 3.2.4 Prestise

Faktor terakhir yang menurut penulis menjadi penyebab intervensi militer Rusia terhadap Georgia adalah prestise. Dalam penggunaan sehari-hari prestise merupakan bagian dari karakter manusia yang terkait dengan kehormatan, harga diri dan gengsi. Dalam bukunya yang berjudul *Honor, Symbols, and War*, Barry O’Neill menyebut definisi prestise yaitu:

“...the belief among members that the person is admired – each one’s belief that the rest of the group believes that the individual possesses a desirable trait...it involves the group’s expectations about its own expectations, but it is based more on deeds done or objects acquired than on precedent.”<sup>340</sup>

Dalam konteks hubungan internasional, negara menggantikan peran individu dan sistem internasional menggantikan peran kelompok. Menurut Hans Morgenthau, negara melaksanakan kebijakan prestise (*policy of prestige*) untuk

<sup>337</sup> *Ibid.*

<sup>338</sup> MAP adalah program yang menyediakan rekomendasi, bantuan dan dukungan yang disesuaikan dengan keperluan negara-negara individual yang ingin bergabung dengan NATO.

<sup>339</sup> International Crisis Group, *op. cit.*, h. 12.

<sup>340</sup> Barry O’Neill, *Honor, Symbols, and War*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999, h. xii.

mendukung kebijakan imperialisme (memperoleh kekuatan) atau kebijakan *status quo* (mempertahankan kekuatan).<sup>341</sup> Kebijakan prestise direfleksikan dalam kebijakan luar negeri yang menurut Morgenthau selalu merupakan hasil pertimbangan dan evaluasi terhadap kekuatan suatu negara *vis-à-vis* kekuatan negara lain dalam kurun waktu tertentu di masa kini maupun masa yang akan datang.<sup>342</sup>

Dari sudut pandang ini intervensi militer Rusia terhadap Georgia adalah implementasi dari kebijakan prestise untuk mendukung *status quo* yaitu peran dan posisi Rusia sebagai penjamin keamanan dan stabilitas di kawasan *near abroad*. Rusia menganggap aksi Georgia di Ossetia Selatan sebagai gangguan keamanan regional sehingga perlu ditanggapi secara cepat dan tegas untuk mencegah meluasnya konflik. Intervensi militer dipandang sebagai upaya untuk menunjukkan supremasi Rusia atas lingkaran pengaruhnya di wilayah bekas Uni Soviet. Selain itu, Rusia ingin menunjukkan statusnya sebagai kekuatan besar dunia dan bahwa Rusia tidak akan lagi mengizinkan tantangan terhadap statusnya tersebut dibiarkan tanpa tanggapan. Dalam hal ini Rusia menerapkan apa yang disampaikan oleh seorang pendukung *Realpolitik* asal Jerman bernama Heinrich von Treitschke mengenai arti penting dari kehormatan nasional, yaitu:

*“Whoever attacks the honor of a state even in its externals, thereby impugns the essential character of the state ... A state must have a very highly developed sense of honor if it is not to be false to its nature. It is not a violet that blooms in the shade; its power is to be displayed proudly and brilliantly; it cannot permit this power to be questioned even symbolically.”*<sup>343</sup>

<sup>341</sup> Hans J. Morgenthau & Kenneth W. Thompson, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (6<sup>th</sup> ed.), New York: Alfred A. Knopf, 1985, h. 94.

<sup>342</sup> *Ibid.*

<sup>343</sup> Dikutip dalam O’Neill, *op. cit.*, h. 89.